

GDL

Digital Library Universitas Pasundan

REFLEKSI APARATUR NEGARA TERHADAP KETAHANAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Administrator Volume 6 No. 2 Januari 2006

Journal from JBPTUNPASPP / 2012-11-20 19:26:07

Oleh : Sutrisno, Ilmu Komunikasi

Dibuat : 2012-03-20, dengan 1 file

Keyword : Ketahanan Nasional Dan HAM

Subjek : Aparatur Negara

Kepala Subjek : Aparatur Negara

Kondisi pemerintahan pasca reformasi saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional, sehingga membutuhkan penanganan serius dan bersungguh-sungguh dalam menangani dan mampu menjawab segala tantangan. Negara Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara, menyadari secara kodrati memiliki sifat kemajemukan dan kebinekaan dalam suku, budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Properti

ID Publisher

Organisasi

Nama Kontak

Alamat

Kota

Daerah

Negara

Telepon

Fax

E-mail Administrator

E-mail CKO

Nilai Properti

JBPTUNPASPP

Ilmu Komunikasi

Hilman Firmansyah

Jln. Setiabudi 193

Bandung

Jawa Barat

Indonesia

+6281320022883

-

firmansyah.hilman@yahoo.com.sg

firmansyah.hilman@yahoo.com.sg

Social

Like 0

Tweet 0

0

This work was carried out with the aid of a grant from INHERENT-DIKTI | Best Viewed with Firefox!

© 2006 ITB. All rights reserved. | Valid XHTML + CSS

Top ^

J u r n a l

ADMINISTRATOR

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Pengelolaan Sampah. Refleksi Perencanaan Kota Thomas Bustomi

Refleksi Kabinet : Diantara Kepentingan Partai Politik Dan Penilaian Kerja Deden Ramdan

Birokrasi Di Indonesia Mendominasi Kegiatan Pemerintah Dan Pembangunan Aa Soeratman

Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif : Urgensi Dan Prinsip Dasar Imas Sumiati

Dimensi-Dimensi Membangun Kualitas Layanan Publik Dindin ABS

Sistem PILKADA Langsung Di Indonesia Dalam Kontelasi UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah & PP No. 06/2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan & Pemberhentian Kepala & Wakil Daerah Endang Trianingsih

Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Desi Fernanda

Refleksi Aparatur Negara Terhadap Ketahanan Nasional Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sutrisno

Refleksi Kritis Terhadap Undang-Undang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Administrasi Iwan Satibi

Kontrol Sosial Dan Demokratisasi Dalam Kebijakan Publik Ine Mariane



Jurnal
ADMINISTRATOR

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 1693-2366

Jurnal Administrator ini merupakan majalah ilmiah yang terbit tiga kali dalam setahun, berisi tulisan ilmiah dan atau hasil penelitian dalam kajian Administrasi Negara baik berbentuk analisis kritis kondisi lapangan maupun kajian teoritis.

- Penasehat : Dekan Fisip Universitas Pasundan
Penanggung Jawab : Dr. H. Uyat Suyatna, Drs., M.S
Pemimpin Redaksi : Sutrisno, Drs., M.Si
Redaktur Pelaksana : Iwan Satibi, Drs., M.Si
Staf Ahli : Dr. H. Benyamin Harits, Drs., M.S
Prof. Dr. H. T. Sutisnawidjaja, Drs., M.S
Dr. H. Soleh Suryadi, Drs., M.S
Dr. Kamal Alamsyah, Drs., M.Si
Hj. Diana Ariffin, Dra., M.Si
H. Aa Soeratman, Drs., M.S
- Dewan Redaksi : Eyo Kahya, Drs
Rudi Martiawan, Drs
Yaya M. Abdul Aziz, Drs., M.Si
Thomas Bustomi, Drs., M.Si
Yulia Segarwati, Dra., M.Si
Imas Sumiati, Dra., M.Si
- Sirkulasi : Team Redaksi
Printing dan Layout : BCM *offset* (022) 203 8934

Administrator menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan baik dalam jurnal di lingkungan Unpas maupun jurnal lainnya di luar, pedoman penulisan tercantum pada kulit belakang jurnal ini.

Alamat Redaksi :
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
Telp/Fax. (022) 420 5945

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
EDITORIAL	ii
Pengelolaan Sampah, Refleksi Perencanaan Kota Thomas Bustomi	1 - 11
Refleksi Kabinet : Diantara Kepentingan Partai Politik dan Penilaian Kerja Deden Ramdan	12 - 16
Birokrasi di Indonesia Mendominasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Aa Soeratman	17 - 23
Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif : Urgensi dan Prinsip Dasar Imas Sumiati	24 - 30
Dimensi-Dimensi Membangun Kualitas Layanan Publik Dindin ABS	31 - 39
Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di Indonesia Dalam Kontelasi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah & PP No. 06/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan & Pemberhentian Kepala & Wakil Daerah Endang Trianingsih	40 - 51
Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia Desi Fernanda	52 - 59
Refleksi Aparatur Negara Terhadap Ketahanan Nasional dan Hak Asasi Manusi (HAM) Sutrisno	60 - 65
Refleksi Kritis Terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Administrasi Iwan Satibi	66 - 75
Kontrol Sosial dan Demokratisasi Dalam Kebijakan Publik Ine Mariane	76 - 84

EDITORIAL

Assalamu'allaikum Wr. Wbr.

Fenomena lingkungan menjadi perhatian yang menghadirkan kontroversi para pakar sejumlah keluhan masyarakat, saat ini kita dihebohkan persoalan lingkungan atas eksekusi realita isu kebijakan publik produk pemerintah, ternyata para pemimpin kita tidak cukup cerdas menggali potensi sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi terapan yang sebenarnya berkembang pesat dikota-kota besar di Indonesia, dipusingkan urusan sampah termasuk kota Bandung, seharusnya menjadi kota bertabur bunga tapi baru bertabur lalat yang terbang membawa sejumlah kuman yang berasal dari tumpukan sampah di sudut-sudut kota.

Masyarakat bertanya sejauhmana pengelola sampah dan perencanaan kota, dimana para intelektual, pakar, pengamat, ilmuwan, dan teknokrat pada saat peristiwa membutuhkannya, dikemanakan dana yang besar, apa output penilaian kerja yang rata-rata memiliki nilai baik, mana partai politik memperhatikan rakyat yang diserang sejumlah serdadu lalat yang membawa bencana bagi manusia, padahal mesin birokrasi tak pernah berhenti mendominasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, juga perencanaan dan penganggaran namun tega mengorbankan rakyat dan menambah kesengsaraan melalui kebijakan harga BBM.

Mungkin perlu perbaikan mekanisme sistem pilkada dari pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian agar memilih pemimpin yang peka pada rakyatnya, juga sistem seleksi pegawai yang profesional agar refleksi aparatur negara terhadap public service menuju ketahanan nasional dan tegaknya hak asasi manusia secara sadar memahami bahwa pemegang kebijakan di negeri ini berawal dari dunia pendidikan, maka perbaikan infra struktur dan supra struktur terus dilakukan terutama kualitas guru dan dosen di kalangan pendidikan dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi perlu perhatian serius pemerintah dan DPR, meski telah dinaikkan anggarannya menjadi 20 %, kenyataan pengalokasian dan kejujuran pengelolaannya masih jauh dari kebutuhan masyarakat, terutama kesejahteraan guru dan dosen sebagai pilar untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak terpecah dengan kebutuhan hidupnya, mungkinkah UU guru dan dosen cukup signifikan jika dipandang dari perspektif administrasi.

Peran pendidikan menjadi penting manakala dianggap sebagai *agent of change* dalam bentuk kontrol sosial menumbuhkan demokratisasi menuju kebijakan publik yang representatif bagi masyarakat dan bangsa, tentu saja Team Redaksi Administrator menyadari perubahan selalu ada proses membutuhkan kesabaran semua pihak, seperti yang sudah ditunjukkan oleh administrator menjadi rujukan bagi kalangan intelektual maupun pelaksana pemerintah pusat dan daerah. Akhirnya pengurus Redaksi Jurnal Administrator mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, terima kasih atas kontribusinya semoga kita semua digolongkan sebagai manusia yang selalu berupaya mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Amin.

Assalamu'allaikum Wr. Wbr.

Bandung, Januari 2006

Redaksi

Refleksi Aparatur Negara Terhadap Ketahanan Nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Oleh : Sutrisno

Abstrak

Kondisi pemerintahan pasca reformasi saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional, sehingga membutuhkan penanganan serius dan bersungguh-sungguh menangani dan mampu menjawab segala tantangan. Negara Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara, menyadari secara kodrati memiliki sifat kemajemukan dan kebinekaan dalam suku, budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian menyebabkan keadaan penduduk Indonesia yang terpecah belah, sehingga penjajah dengan leluasa mengadakan penindasan lebih dari tiga setengah abad. Sejarah mencatat bahwa perjuangan pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan, tidak lepas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri, dalam interaksi tersebut dapat timbul dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Menghadapi segala macam bentuk ancaman yang dihadapi, perlu suatu kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan yang dinamakan dengan Ketahanan nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi tersebut dengan sendirinya akan menjadikan suatu bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang tinggi dapat memberikan hak dan kewajiban kepada warga negaranya secara proporsional dan mampu mencapai kesejahteraan dalam menanggulangi segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan yang selalu menghampiri bangsa dan negara selama ini.

Kata Kunci : Ketahanan nasional dan HAM

Pendahuluan

Pemerintahan Indonesia pasca Megawati memasuki fase baru, dalam pertumbuhannya menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan postur pemerintah sebelumnya. Kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional, sehingga membutuhkan penanganan serius dan bersungguh-sungguh serta membutuhkan "team work" yang solid dan mampu menjawab segala tantangan yang ada di depan matanya.

Bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara, telah menyadari bahwa secara kodrati memiliki sifat kemajemukan dan kebinekaan dalam suku, budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari tinjauan sejarah, sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah ada upaya untuk menyatukan kepulauan Nusantara, namun selalu kurang mampu mempertahankan kejayaan yang dicapainya. Demikian menyebabkan keadaan

penduduk Indonesia yang terpecah belah, sehingga penjajah leluasa mengadakan penindasan lebih dari tiga setengah abad.

Pengalaman tersebut menimbulkan semangat kebangsaan yang berkembang melalui kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah pemuda yang merupakan sikap dan tekad persatuan kesatuan bangsa pada tahun 1928, dan puncaknya yaitu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dalam mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia tak lepas dari ancaman, tantangan, dan gangguan, sehingga seluruh rakyat Indonesia perlu dibekali kemampuan untuk mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara. Ancaman yang dihadapi Indonesia datang dari dalam dan luar negeri karena bangsa Indonesia dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi dapat timbul dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk menghadapi segala macam bentuk ancaman yang dihadapi, perlu suatu kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan daya tahan.

Ketahanan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional ini pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan pemberdayaan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan berpedoman pada wawasan nusantara. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu bangsa yang memiliki ketahanan nasional tinggi akan mampu mencapai apa yang dicita-citakan, karena bangsa tersebut mampu menanggulangi segala macam tantangan, ancaman, dan gangguan yang

dihadapi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Atau dengan perkataan lain bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk menghadapi segala macam tantangan baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata, rohaniyah dan jasmaniyah. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Kedua macam pendekatan itu senantiasa ada pada setiap saat kehidupan nasional, bergantung kepada kondisi-kondisi nasional dan internasional serta situasi yang dihadapi, maka pada suatu saat dapat diletakkan titik berat kepada pendekatan pertama dan pada saat yang lain dapat titik berat itu dialihkan kepada pendekatan kedua. Tetapi meskipun pada saat titik berat diletakkan kepada pendekatan kesejahteraan, namun pendekatan keamanan tidak boleh dihilangkan sama sekali. Hal ini berlaku sebaliknya. Perlu kita sadari kesejahteraan

keamanan itu dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, sebaliknya juga penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Ini berarti penyelenggaraan ketahanan nasional menghasilkan gambaran kesejahteraan dan sekaligus pula gambaran keamanannya. Dalam kenyataan hidup gambaran kesejahteraan nasional dan keamanan nasional menjadi satu gambaran ketahanan nasional.

Perwujudan Ketahanan Nasional

Perwujudan ketahanan nasional Indonesia melibatkan dua aspek yaitu aspek trigatra dan pancagatra. Adapun aspek-aspek tersebut adalah:

a. Aspek Trigatra, meliputi:

- Lokasi dan letak geografis Indonesia
- Aspek keadaan dan sumber-sumber kekayaan alam
- Aspek penduduk

Kekayaan alam baik kualitas maupun kualitas perlu sekali diinventarisasi. Juga tentang lokasinya karena didalam perencanaan dan pembangunan sumber alam dan lokasinya saling berhubungan erat. Distribusi penduduk sangat penting dan mempengaruhi langsung ketahanan nasional. Mata pencaharian penduduk juga dipengaruhi oleh keadaan geografi sekelilingnya. Distribusi penduduk erat hubungannya dengan masalah transmigrasi dan pusat-pusat pengembangan.

Kekayaan alam baru mempunyai manfaat, jika diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi.

Penduduk harus mempunyai potensi kekayaan alam yang ada di negaranya dan mampu melestarikan (mereservasikan) untuk dimanfaatkan di kemudian hari.

b. Aspek Pancagatra meliputi Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan

Ideologi sebagai falsafah bangsa dan landasan ideal negara, bernilai penentu dalam pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya. Tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran berpolitik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, rasa keamanan, dan sebagainya. Karena saling keterkaitan, maka perubahan di salah satu aspek akan mempunyai pengaruh terhadap aspek lainnya. Situasi politik yang kacau yang memungkinkan terjadinya pertikaian dan pemberontakan merupakan suatu kerawanan yang membahayakan ketahanan nasional, sebaliknya keadaan politik stabil dan dinamis memungkinkan pembangunan di segala bidang dan memberikan rasa aman serta memperkokoh ketahanan nasional.

Ketahanan ekonomi berhubungan dengan ketahanan di bidang ideology, politik, social budaya dan pertahanan dan keamanan yang berfungsi sebagai penunjang. Sebaliknya keadaan ekonomi stabil dan maju menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan di bidang lain.

Keadaan sosial yang serasi, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan

damai. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraannya, baik fisik materi, maupun mental kejiwaan. Keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi, penuh budaya dan kepribadian yang tidak terpuji.

Ketahanan pertahanan keamanan memerlukan juga penunjang gatra lain. Keadaan stabil, maju dan berkembang di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan social budaya memperkokoh pertahanan keamanan nasional. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa tanpa pertahanan keamanan nasional yang memadai akan lemahlah ketahanan nasional suatu bangsa.

Hak Asasi manusia (HAM) Suatu Kajian Yuridis

Berpijak dari postur pemerintahan masa lalu itulah yang menyebabkan perkembangan masalah hak asasi manusia (HAM) sekarang disorot, dan sorotan itu terutama terhadap segi politisnya. Sorotan itu masuk akal dan dapat dimengerti, tetapi sekaligus juga tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kasus HAM dewasa ini. Pertanyaannya yang sekarang sedang mengemuka adalah: Apakah kasus-kasus HAM sekarang berkembang sebagai masalah politis atautkah berkembang sekedar pelanggaran biasa saja? sehingga dalam perkembangan selanjutnya, akan terpenuhi bagian-bagian yang merupakan kesatuan organis yang fungsional dalam menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut tentang kasus-kasus HAM yang terjadi di negara republik ini.

Dalam konteks ini, terjadilah perubahan yang tidak saja dalam iklim sosial-politik, tetapi juga dalam iklim sosial-

ekonomi dan sosial-budaya yang berlainan dari sebelumnya dan mempunyai dampak besar terhadap segala penyelesaian setiap kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bidang sosial-politik berkembang dampak yang lebih besar, bahkan kemudian terjadi pasang surut, fluktuasi kasus HAM yang terjadi setelah pasca reformasi masih tetap lebih besar dari sebelumnya.

Pada mulanya berkembang situasi konflik yang membawa ketegangan di mana-mana, taruhlah masalah disintegrasi Timor Timor, masalah pelanggaran HAM di Aceh, Kasus Ambon dan Poso, kasus Tanjung Priok, kasus Semanggi, kasus penyerangan aparat kepolisian terhadap mahasiswa UMI di Makasar, demo buruh pabrik dan operasi ketertiban bagi PKL dan terakhir kasus TPST Bojong di Bogor serta kasus-kasus lain yang menyangkut tentang pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau aparat yang terkait. Kemudian terjadilah proses yang menyuburkan pertumbuhan pers yang sanggup menangkapnya, sehingga khalayak ingin memperoleh informasi dan interpretasi tentang peristiwa serta arah kejadian yang lengkap tidak apriori memihak, dan karena itu memberikan hormat akan penilaian khalayak sendiri.

Dalam masyarakat yang mengukur setiap dinamikanya berdasarkan realita apa yang ada pikiran dan hatinya, komunikasi sekedar basa basi gradasi perihal tidak tulus tidaklah bertingkat-tingkat dan bervariasi, misalnya karena memang tidak memahami persoalan, tidak tahu duduknya perkara, tidak sama latar belakangnya baik latar belakang pemahaman dan pengalaman maupun latar belakang referensinya.

Rakyat hakekatnya adalah institusi pemegang kedaulatan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu, dalam kenyataan prosesualnya cenderung hanya dijadikan obyek elit pemegang mandat kekuasaan atau oposisinya saja. Betapa tidak, selama republik ini berusia 57 tahun lebih, kendati kita sedang memasuki era reformasi dengan alam keterbukaannya, nasib rakyat kebanyakan belum bergeming alias tidak berubah.

Dimasa lalu, nasibnya dijadikan dalih untuk membuat proposal pinjaman ke negara-negara donor atau bank dunia. Biasanya, program pembangunan yang tersentralistis, mengundang paradigma pemerintahan kolonial dalam melayani rakyat. Hanya yang menguntungkan kocek oknum birokrasi saja yang dilayani dengan layak, sementara rakyat yang berkocek tipis harus antri untuk mendapat pelayanan dari pemerintah, yang proses komunikasi, bisa terjadi hambatan yang secara teknis disebut distorsi. Munculnya distorsi bisa berasal dari sang komunikator, gangguan perangkat komunikasi juga menyebabkan distorsi. Kondisi struktural ini, baik dimasa pemerintahan kolonial, pasca kemerdekaan, rejim orde baru, dan pemerintahan sekarang dalam melayani rakyatnya, khususnya sebagai kapasitas komunikator, belum total mencitrakan jatid dirinya sebagai pelayan publik masih terdapat aspek diskriminatif dan masih memperlihatkan arogansi kekuasaan. padahal kita maklumi pemerintahannya itu tidak lagi kredibel, karena legitimasi rakyat berdaulat masih menjadi polemik diantara komponen elit bangsa yang dikaitkan dengan tuntutan aspirasi rakyat yang menginginkan reformasi total terhadap seluruh tatanan kenegaraan.

Realitasnya, rakyat harus menanggung nasib diperintah oleh elit politik yang masih menggunakan paradigma pemerintahan kolonial dalam kemasan baru, walaupun ia sanggup membangun fisik negeri ini, tapi ia akan membungkam daya kreativitas dan suara nurani rakyat. Rakyat dininabobokan oleh ritual gunting pita peresmian proyek yang dilaksanakan oleh keluarga maupun kroni penguasa.

Membangun Indonesia Baru yang dilandasi kehidupan masyarakat madaniah yang penuh cinta kasih. Kendati begitu, dalam prosesnya harus dihitung berbagai kelemahan, baik bersifat struktural kultural maupun psikologis, tanpa itu kita terjebak kembali oleh perilaku budaya politik paradigma pemerintahan kolonial. Persoalan mendasar yang dihadapi saat ini, tidak terlepas dari rangkaian perilaku budaya politik masa lalu yang erat dengan budaya feodal kolonialistik. sehingga reaksinya muncul ke permukaan setelah rakyat di berbagai daerah memiliki kembali keberaniannya untuk memperjuangkan hak kedaulatannya. Paling tidak, mereka itu menggugat pemerintah pusat untuk melakukan penataan terhadap pembagian sumberdaya produktif didaerahnya. Mereka ingin pembagian yang proporsional, dengan tekanan sumberdaya alam yang dimilikinya itu mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Selama ini mereka merasakan sumberdaya alam yang potensial yang dikelola sentralistik hanya mengenyangkan orang-orang pusat saja. Sementara rakyat di daerahnya tetap melarat dan hanya menjadi korban pencemaran limbah yang dihasilkan industri raksasa yang mengeksploitasinya.

Keadaan ini, mengundang kesan mendalam bagi rakyat lokal, mereka merasa menjadi negeri jajahan. Akibatnya, kita dihadapkan pada persoalan disintegrasi bangsa yang akan menguras tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Bahkan, kita akan dihadapkan kepada masalah yang menyangkut nyawa manusia. Menghadapi soal ini, apakah dengan adanya Undang- Undang dan Peraturan yang mendukung, terkadang kontroversial dan ditanggapi cerdas oleh masyarakat, yang isinya hanya sekedar cek kosong belaka masih bisa diandalkan atau hanya sebagai asesoris saja, yang bisa dikatakan ketika para pimpinan partai berkampanye di daerah potensinya, dengan menyuarakan kata-kata manis dan berbau angin surga saja, yang pada kenyataannya masih merupakan "lips service" saja.

Penutup

Secara psikologis kultural, persoalan yang kita hadapi menyangkut perilaku budaya politik elit kita, baik yang sudah berpengalaman dalam rejim lama maupun yang baru lahir. Mereka masih terperdaya oleh eforia politik lewat retorika kesadaran verbal yang kita rasakan, saling hujat mewarnai dinamika politiknya, rakyat yang tidak berdosa lagi-lagi yang menjadi korban kesengsaraan verbal yang terus terjadi ketika pelanggaran-pelanggaran HAM masih terjadi. Realitas psiko politik terjadi di masyarakat kita ini, akan dijadikan momentum dalam proses pergulatan nilai yang menjadikan kontra produktif dengan segala harapan kita akan terselenggaranya pemerintahan yang jujur adil. Ditambah dengan musibah alam, aksi teror dan terorisme yang telah menjadi bagian dari

wacana kehidupan politik negeri kita ini, yang kian hari semakin begitu terasa pada kehidupan sosial budaya kita.

Sementara aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung negara, seakan tidak bertenaga menghadapi masalah ini, belum tuntas persoalan yang baru, datang masalah-masalah yang menghimpit lainnya, sementara petingginya hanya berdalih, kadang tanpa solusi untuk menuntaskan masalah yang terjadi selama ini, karena yang perlukan adalah aparatur negara yang memerankan unsur idealistis dan realistik dalam mengaplikasikan program kerjanya, sehingga bentuk harapan dan kenyataan kita akan terwujud dengan sendirinya.

Daftar Pustaka

- Al Chaidar, *Reformasi Prematur*, Pustaka Darul Falah, 1998, Jakarta.
- Akhmadi,, *Peta Bumi Partai Politik : atau Status Quo*, Policy Analysis No. 21, 2 Maret 1999, IPA, Institute of Public Affairs, 1999, Jakarta.
- Gumelar, Agum, *Pluralisme Budaya Merupakan Modal Terwujudnya Masyarakat Madani*, Saresehan Pemuda dan Temu Konsultasi Kader Bela Negara, 1999, Bandung.
- Sanusi, Shalahuddin, KH, *Integrasi Ummat Islam*, Orba Shakti, 1987, Bandung.
- Tim Lipi, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Mizan, Bandung, 2001.